

Diplomasi Bencana India terhadap Nepal pada Tahun 2015

Wahyu Rozzaqi Ginanjar

Program Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184

e-mail: zaqi.ginanjar@gmail.com

Disaster is an inevitable thing for all human beings. Very often disasters occur in certain political contexts. Disaster diplomacy is an effort of a country to improve the quality of diplomacy with other countries by utilizing disasters to open new opportunities in terms of diplomatic context. This was done by India following the massive earthquake in Nepal in 2015. India has very specific concerns related to domestic conditions in Nepal. India's concern over Nepal's domestic conditions is generally related to the issue of the Madhes movement in the Tarai region. This became a concern to India because the Madhes movement has created instability in the Tarai region that has disrupted India's economic agenda in the South Asian region. Based on this, India then encouraged a number of diplomatic efforts in the context of creating reconciliation between the Madhes and Pahadi groups who were in conflict in Nepal. The earthquake in Nepal was used by India as a catalyst to support diplomatic efforts to create a more stable domestic condition in Nepal. This article then tries to discuss the form of disaster diplomacy carried out by India towards Nepal. Using the concept of disaster diplomacy from Ian Kelman, this article illustrates India's efforts to utilize the Nepal earthquake disaster as a catalyst to improve the quality of diplomacy towards Nepal as a whole in relation to the Madhes movement. This article discovers the fact that Indian disaster diplomacy met a contrary to what was expected outcome, following the growing conflict between Madhes and Pahadi groups after the 2015 Nepal earthquake.

Keywords: *Disaster Diplomacy, India, Madhes, Nepal, Tarai*

Abstrak

Bencana merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Sering kali bencana terjadi dalam konteks politik tertentu. Diplomasi bencana merupakan upaya suatu negara untuk meningkatkan kualitas diplomasi dengan negara lain dengan memanfaatkan ruang yang terbuka akibat terjadinya bencana. Hal tersebut yang dilakukan oleh India menyusul terjadinya gempa bumi hebat di Nepal pada tahun 2015. India memiliki perhatian yang sangat spesifik terkait kondisi domestik di Nepal. Keresahan India terhadap kondisi domestik Nepal pada umumnya terkait dengan isu gerakan orang-orang Madhes di daerah Tarai. Hal tersebut menjadi perhatian India karena gerakan Madhes menciptakan instabilitas di wilayah Tarai sehingga mengganggu agenda ekonomi India di kawasan Asia Selatan. Berdasarkan hal tersebut India kemudian mendorong sejumlah upaya diplomasi dalam rangka menciptakan rekonsiliasi antara kelompok Madhes dan Pahadi yang sedang berkonflik di Nepal. Gempa bumi yang terjadi di Nepal digunakan India sebagai katalisator untuk menunjang upaya-upaya diplomatis untuk mewujudkan kondisi domestik Nepal yang lebih stabil. Artikel ini kemudian mencoba membahas terkait bagaimana bentuk diplomasi bencana yang dilakukan India terhadap Nepal. Menggunakan konsep diplomasi bencana dari Ian Kelman, artikel ini menggambarkan upaya-upaya India yang menjadikan bencana gempa bumi Nepal sebagai katalisator untuk meningkatkan kualitas diplomasi terhadap Nepal secara keseluruhan terkait gerakan orang-orang Madhes. Artikel ini menemukan fakta bahwa diplomasi bencana India tersebut menemui hasil yang bertolak-belakang dengan yang diharapkan menyusul konflik yang berkembang antara kelompok Madhes dan Pahadi pasca terjadi gempa Nepal 2015.

Kata kunci: Diplomasi Bencana, India, Madhes, Nepal, Tarai

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 25 April 2015 Nepal diguncang gempa skala besar dengan kekuatan 7,8 skala richter. Menurut laporan National Geographic, gempa tersebut memiliki titik pusat di sekitar distrik Gorkha yang terletak di sebelah barat laut kota Kathmandu. Menurut laporan BBC, Peristiwa tersebut memiliki dampak yang serius. Tercatat 8 juta orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Adapun sekitar 8800 orang meninggal dunia. Di lain hal, peristiwa gempa bumi besar tersebut menghancurkan sebanyak 604.930 rumah (BBC News, 2015a). Diperkirakan bahwa nilai total kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi ini ialah sekitar US \$ 7 miliar (Subedi & Bahadur Poudyal Chhetri, 2019).

Sebagai respon terhadap kejadian tersebut Pemerintah Nepal segera menetapkan status darurat bencana dan secara terbuka meminta bantuan internasional. Pemerintah Nepal melalui *National Disaster Framework 2013* berhasil meminta bantuan internasional dan mengoordinasikan sebagian kegiatan operasional tanggap darurat dalam menangani dampak dari peristiwa gempa bumi tersebut.

Permintaan bantuan dari pemerintah Nepal terhadap dunia internasional mendapatkan respon positif dari komunitas internasional. Dalam menanggapi permohonan bantuan internasional dari pemerintah Nepal, berbagai aktor internasional terlibat dalam upaya penanganan terhadap dampak yang dihasilkan dalam peristiwa gempa tersebut. Dalam prosesnya, upaya tersebut melibatkan 34 negara dengan 18 satuan militer dan 16 tim non-militer dengan jumlah personel sebanyak 4.521 orang

(Subedi & Bahadur Poudyal Chhetri, 2019).

Salah satu aktor yang terlibat dalam merespon permintaan bantuan tersebut ialah India. India merupakan salah satu negara yang memberikan bantuan yang secara materil berjumlah sangat besar. Dalam catatan BBC, total bantuan yang diberikan oleh India kepada Nepal dalam merespon peristiwa gempa bumi yang terjadi ialah sekitar 1 miliar US\$ (BBC News, 2015b). Hal tersebut dikemukakan oleh menteri luar negeri India saat itu, Sushma Swaraj. Sushma Swaraj mengemukakan bahwa kedua Negara yakni India dan Nepal, merupakan negara tetangga dengan sejarah persahabatan yang sangat lama sehingga perlu selalu bekerja dalam suka ataupun duka (Economic Times, 2015).

Dalam dimensi Hubungan Internasional, respon cepat tanggap yang dilakukan oleh India terhadap Nepal dapat dipahami sebagai upaya India untuk mengedepankan aspek *humanitarian* dalam pola interaksi terhadap negara-negara tetangga di sekitarnya. Namun, terdapat aspek lain, yang cukup menarik untuk dikaji dalam melihat kegiatan India dalam membantu Nepal pasca gempa bumi 2015. Hubungan India dan Nepal, sebelum gempa terjadi, memiliki dinamika tersendiri. Terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian India dalam konteks politik dalam negeri Nepal. Salah satu yang menjadi perhatian India ialah terkait isu amandemen konstitusi Nepal pada tahun 2008 yang mana berhubungan dengan upaya-upaya diskriminasi terhadap orang-orang suku Madesh.

India sangat keberatan dengan keberadaan konstitusi tersebut. Alasan utamanya ialah bahwa konstitusi Nepal mengabaikan hak-hak orang Madhesh Nepal yang tinggal di perbatasan India, Orang-orang Madesh sebagian besar

memiliki hubungan kedekatan bahkan berada pada level keluarga dengan orang India (Shastri, 2016). Keresahan orang-orang Madhesh yang tidak bersepakat dengan konstiusi tersebut tentu saja merupakan masalah bagi India. Pergerakan orang-orang Madesh tersebut kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perlawanan dan kerusuhan di bagian Terai (Shastri, 2016). Tuntutan kelompok Madheshi berfokus pada beberapa masalah, seperti batas-batas provinsi dan penyediaan kewarganegaraan, terutama bagi orang-orang Madesh yang berasal dari orangtua campuran Nepal dan India. Hal tersebut tentu akan menjadi masalah baru bagi India, karena wilayah Terai di mana lokasi orang-orang Madhes tinggal merupakan perbatasan yang menjadi penghubung bagi India dan Nepal. Jika wilayah tersebut ataupun Nepal secara keseluruhan mengalami instabilitas, maka hal tersebut akan mengnggu agenda-agenda ekonomi bahkan politik India di kawasan Asia Selatan. Berdasarkan hal tersebut, stabilitas Nepal merupakan salah satu hal yang menjadi agenda India di kawasan.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui latar belakang tersebut artikel ini kemudian mengajukan rumusan masalah: bagaimana bentuk diplomasi bencana India terhadap Nepal pada tahun 2015 ?. Artikel ini pada perjalanannya membahas tentang bagaimana bencana gempa dimanfaatkan India untuk meningkatkan kualitas diplomasinya terhadap Nepal. Menggunakan konsep Diplomasi Bencana yang ditawarkan oleh Ian Kelman, artikel ini hendak melihat proses dan hasil yang terjadi dari upaya-upaya diplomasi bencana India terhadap Nepal pada tahun 2015.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Bantuan Bencana dan Diplomasi Bencana

Dalam rangka mengetahui aspek strategis dalam bantuan bencana yang dilakukan oleh negara-negara di dunia, akan menjadi sangat penting untuk mengetahui konseptualisasi bantuan luar negeri. Bantuan internasional dalam praktiknya memiliki banyak dimensi agenda dan motivasi. Dalam hal ini, negara pendonor biasanya mengikut-sertakan agenda non-kemanusiaan dalam pola distribusi bantuan luar negeri yang dijalankan (Cohen & Werker, 2008). Bantuan luar negeri dalam skala besar pertama yang diketahui ialah berbentuk paket bantuan luar negeri dalam kerangka *Marshall Plan* yang diinisiasi oleh Amerika Serikat pasca perang dunia kedua. Melalui *Marshall Plan*, Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara Eropa Barat dalam rangka mencapai kepentingan geostrategis dan ideologisnya. Motivasi dalam paket bantuan *Marshall Plan* tidak hanya dalam kerangka kemanusiaan. Seiring dengan didistribusikan program *Marshall Plan*, Amerika Serikat berusaha membatasi penyebaran komunisme di Eropa Barat. Sebagai bagian dari agenda Amerika Serikat yang lebih besar, Amerika Serikat melakukan mobilisasi sumber daya dengan tujuan mencegah pengaruh Soviet memperluas ke Eropa Barat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa bantuan kemanusiaan selama Perang Dingin diberdayakan untuk mempromosikan kepentingan ideologis Amerika Serikat.

Menurut Dudley dan Montmarquette terdapat tiga motif negara donor dalam memberikan bantuan luar negeri yang dapat diidentifikasi (Dudley & Montmarquette,

1976). Motif pertama ialah dimensi politik strategis, di mana bantuan luar negeri dimaksudkan sebagai alat tukar bagi kepentingan donor (*Quid pro Quo*). Kedua ialah dimensi ekonomi politik, di mana bantuan luar negeri dimaksudkan dalam rangka meningkatkan perdagangan bagi negara donor kepada negara penerima (*Aid for Trade*). Kemudian dimensi yang terakhir yaitu dimensi kemanusiaan, di mana bantuan luar negeri dimaksudkan dalam rangka perbaikan/peningkatan taraf hidup penduduk negara penerima (*Humanitarian*). Di lain hal, dalam pandangan Alesina dan Dollar, bantuan luar negeri seringkali dimotivasi oleh pertimbangan politik strategis. Sebagai contoh ialah terkait bantuan AS ke Timur Tengah yang mana dalam perjalanannya seringkali mengesampingkan kondisi kemiskinan dalam rangka mengedepankan kepentingan geostrategisnya. Pasca terjadinya peristiwa 11 September 2001, terdapat pola baru dalam bantuan asing dimana bantuan menjadi lebih terpusat pada persoalan keamanan (Alesina & Dollar, 2000).

Poin yang dapat ditangkap dalam hal ini ialah bahwa bantuan luar negeri sebagai alat untuk mencapai kepentingan strategis seringkali memiliki penekanan pada dimensi geostrategis. Walaupun di lain hal terdapat dimensi-dimensi lainnya, seperti dimensi *humanitarian*. Sebagian besar motif suatu negara dalam memberikan bantuan luar negeri bergantung pada situasi serta kondisi dari negara donor. Motivasi negara donor dalam mendistribusikan bantuan luar negeri dapat berubah seiring dengan perkembangan isu dalam konteks geopolitik.

Demikian pula dengan distribusi bantuan luar negeri terkait bencana juga memiliki dimensi geostrategis. Dalam hal ini, bencana menciptakan ruang bagi perubahan dan peningkatan hubungan antar

negara. Hubungan tersebut bisa berupa penguatan hubungan bilateral melalui tindakan non-koersif, seperti misi penyelamatan segera setelah bencana alam. Ketika suatu negara menetapkan status *states of emergency* terkait bencana alam, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor internasional yang memiliki kapabilitas memadai untuk menyertakan agenda mereka dalam distribusi bantuan.

Ian Kelman menawarkan sebuah konsep dalam rangka mengkaji sejauh mana bencana alam dapat membuka ruang baru bagi diplomasi. Hal tersebut yang kemudian disebut sebagai *Disaster Diplomacy* atau diplomasi bencana. Adapun premis utama dalam pandangan Ian Kelman tentang diplomasi bencana ialah bahwa kegiatan-kegiatan terkait penanganan bencana memberikan peluang untuk mendorong kerja sama antara negara atau masyarakat yang sedang terlibat konflik (Kelman, 2013). Peluang-peluang tersebut kemudian dapat dimanifestasikan pada saat sebelum dan sesudah bencana, yang mana berdasarkan hal tersebut berarti bahwa setiap upaya kolaborasi kegiatan yang terkait dengan penanganan bencana dapat dipahami sebagai bagian dari diplomasi bencana. Ian Kelman dalam penelitiannya mengatakan bahwa bencana dapat berfungsi sebagai katalisator dalam transformasi upaya-upaya diplomasi di daerah konflik, namun di sisi lain, diplomasi bencana tidak kemudian dapat menciptakan basis awal diplomasi. Sebagai hasil dari berbagai studi kasus, Ian Kelman memiliki temuan bahwa diplomasi bencana seringkali memiliki tiga kemungkinan hasil, yaitu: hasil jangka pendek, hasil jangka panjang, dan hasil berlawanan dari yang diinginkan (Kelman, 2013).

Hasil jangka pendek terjadi ketika bencana memberikan jalan baru bagi upaya negosiasi antara pihak-pihak yang sedang terlibat konflik. Hal tersebut dapat berhasil,

dengan catatan bahwa perlu terdapat landasan negosiasi yang sudah ada sebelumnya. Dalam pembahasan terkait hasil jangka panjang didapatkan temuan bahwa prasangka yang sudah ada sebelumnya pada setiap aktor yang berkonflik merupakan faktor kuat dalam diplomasi sehingga memori kolaborasi selama bencana dapat dengan cepat memudar. Dalam hasil yang menghasilkan efek yang berlawanan dari yang diharapkan, upaya diplomatik seringkali menjadi bumerang. Alih-alih meningkatkan potensi untuk perdamaian, diplomasi bencana menjadi faktor yang meningkatkan konflik.

Melalui penjabaran tersebut, Ian Kelman mencoba untuk menunjukkan bahwa tidak hanya peluang diplomasi yang dapat timbul setelah bencana tetapi juga potensi eskalasi konflik atau bahkan bencana dapat berujung kepada perang. Ian Kelman menjabarkan beberapa studi kasus terkait bagaimana diplomasi bencana pada kasus-kasus bencana alam seperti Topan Nargis di Burma; gempa bumi di Cina, India, Pakistan, Iran, Turki, dan Yunani; Badai Katrina di Amerika Serikat; serta tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Hasil dari masing-masing studi kasus beragam (Kelman, 2013).

Melalui beberapa konsep di atas, artikel ini pada perjalanannya mencoba untuk menelaah sejauh mana agenda strategis India terhadap Nepal terkait konflik yang terjadi di level nasional Nepal antara kelompok orang Madhes di daerah Tarai dengan kelompok mayoritas di Nepal. Konsep motif bantuan luar negeri digunakan untuk menelaah dimensi agenda yang disertakan oleh India dalam upayanya merespon gempa bumi di Nepal. Sedangkan konsep diplomasi bencana digunakan dalam rangka menelaah sejauh mana bencana alam dan upaya India untuk membantu Nepal membuka ruang

diplomasi baru bagi India, kelompok Madhesi dan pemerintah Nepal.

3. Pembahasan

3.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Gerakan Madhesi

Tipologi masyarakat Nepal berdasarkan etnis terdiri dari tiga kategori, yaitu: *Indo-Aryan*, *Mongoloid*, dan *Austro-Asiatic*. Hal itu membentuk perbedaan yang signifikan dalam segi budaya, tradisi, agama, bahasa, dan kepercayaan di antara masyarakat Nepal sendiri. Dari segi bahasa misalnya, masyarakat Nepal dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok yang berbeda, yaitu: kelompok masyarakat perbukitan yang berbicara bahasa Nepal (*Khas-Kura*) dan di sisi lain terdapat orang Tarai yang berbicara bahasa Hindi dan Nepal.

Orang-orang Madhes secara kelompok etnis tergolong ke dalam etnis *Indo-Aryan*. Kelompok orang-orang *Madhes* merupakan kelompok masyarakat yang bermukim di sekitar daerah Tarai, yang mana merupakan kelompok etnis berbasis sistem kasta. Di samping itu, terdapat kelompok orang-orang Pahadi, yang mana merupakan golongan kelompok etnis yang berasal dari masyarakat perbukitan dan berbahasa Nepal. Terdapat perbedaan dari segi budaya, tradisi, kepercayaan bagi orang-orang Madhes dengan orang-orang Pahadi. Dalam konteks gerakan yang dilakukan oleh orang-orang Madhes, identitas keetnisan tersebut menjadi penting dalam rangka membentuk identitas yang dapat diakui secara universal. Gerakan Madhesi kemudian menjadi manifestasi dari segala bentuk marginalisasi dan pengasingan yang dilakukan oleh elit pemerintahan Nepal.

Menurut Subodh Bharti, terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab munculnya gerakan Madhesi, diantaranya ialah: ketimpangan ekonomi, rendahnya representasi politik, migrasi orang-orang Pahadi ke wilayah Terai, dan isu kewarganegaraan (Bharti, 2019). Faktor pertama, yaitu ketimpangan ekonomi, orang-orang Madhes telah mengalami sejarah diskriminasi sejak zaman Raja Prithvi Narayan Shah pada tahun 1768. Hingga Nepal menjadi sebuah negara bangsa, orang-orang Madhes masih diperlakukan sebagai masyarakat kelas dua oleh golongan Pahadi (Bharti, 2019). Hak orang-orang Madhes dan hak kewarganegaraan mereka dibatasi oleh aspek politik identitas. Orang-orang dari golongan Pahadi lebih memiliki ruang untuk mengisi pos-pos strategis dan menempati jabatan di berbagai sektor. Sehingga hal ini lah yang kemudian menciptakan ketimpangan sosio-ekonomi bagi orang-orang Madhes.

Di samping itu, terdapat faktor kedua yakni representasi politik. Orang-orang Madhes memiliki representasi politik yang rendah di level nasional. Sedangkan di dalam militer orang-orang Madhes hampir tidak ada dibandingkan dengan golongan lainnya. Hal tersebut dipicu karena persepsi di kalangan elit Nepal sendiri, yang mana sebagian besar merupakan orang dari golongan Pahadi, menganggap bahwa orang-orang Madhes tidak loyal terhadap Nepal (Bharti, 2019). Kelompok elit politik, dan bahkan sebagian besar masyarakat Nepal, memiliki persepsi bahwa orang-orang Madhes lebih loyal kepada India, sehingga hal tersebut yang memunculkan upaya-upaya diskriminatif terhadap orang-orang Madhes.

Persepsi tersebut muncul pasca terjadinya migrasi massal orang-orang Pahadi pada tahun 1950. Pertumbuhan populasi, kurangnya lapangan pekerjaan,

dan kelangkaan sumber daya mendorong elite Nepal merancang sebuah kebijakan transmigrasi oleh *Department of Resettlement of His Majesty's Government of Nepal* (HMG/N). Hal tersebut mendorong migrasi besar-besaran orang-orang dari Hills, yang mana ialah dari kelompok Pahadi. Sejak 1952 hingga 1954 populasi dari kelompok Pahadi hanya sekitar 6 persen dari total populasi di daerah Terai, yang mana meningkat menjadi sekitar 43 persen pada tahun 1981 dan tetap signifikan jumlahnya pada tahun 1991 dan 2011. Di sisi lain, populasi orang Madhes secara angka masih dominan, namun terlihat peningkatan yang sangat mencolok terkait pertumbuhan populasi orang-orang Pahadi dibandingkan orang Madhes. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1: Populasi Terai berdasarkan kelompok etnis (Bharti, 2019)

Year	Pahadis	Madhesis	Total	percent of Pahadis	percent of Madhesis
1952/54	142,000	2,246,000	2,388,000	5.9	94.1
1981	2,795,000	3,762,000	6,557,000	42.6	57.4
1991	3,444,000	5,262,000	8,706,000	39.6	60.4
2001	4,120,000	7,092,000	11,212,000	36.7	63.3

Hal ini menyebabkan migrasi orang-orang Terai asli yang merupakan kelompok golongan Madhes, ke negara-negara bagian India, seperti Bengal, Bihar, Uttar Pradesh dan Punjab, Haryana serta berbagai bagian lain di India. Orang-orang Madhes bermigrasi dan berasilmilasi di bagian-bagian India untuk mencari penghidupan dan pekerjaan yang mana kemudian berujung pada stigma bahwa orang-orang Madhes tidak loyal terhadap Nepal.

Hal-hal di atas masih terikat satu sama lain dengan faktor terakhir, yaitu faktor kewarganegaraan. Gagasan inti bagi Nepal sebagai negara-bangsa ialah bahwa raja merupakan representasi dari pada dewa, sebagaimana dituliskan oleh kitab suci agama Hindu tradisional, sehingga tidak

ada satupun warganegara yang mampu mempertanyakan legitimasi sang raja. Hal tersebut mengarah kepada proses Hinduisasi Nepal sebagai negara bangsa.

Dalam upaya penerapannya, para Raja di Nepal memulainya dengan homogenisasi budaya berdasarkan kultur orang-orang Pahadi, yang mana merupakan golongan kasta tinggi Hindu, disusul oleh inisiasi dan gagasan tentang penyeragaman identitas dan budaya. Pada tahun 1962 Nepal menjadi Kerajaan Hindu, semua simbol nasional seperti warna merah, sapi, dan tanda-tanda Dewa Wisnu mengacu kepada Monarki Hindu. Bahasa Nepal (*Khas-Kura*) merupakan bahasa resmi yang sifatnya wajib digunakan di Nepal (Bharti, 2019). Hal tersebut mengesampingkan asal-usul berbagai etnis lain, seperti orang-orang Madhes. Segala hal tersebut mengarah kepada pembentukan identitas nasionalisme eksklusif berbasis nasionalisme Hindu-Nepal. Upaya tersebut merupakan model pembangunan bangsa yang bersifat *top down*, di mana konsep identitas ditentukan oleh otoritas negara.

Implikasi dari homogenisasi identitas tersebut kemudian berujung kepada tindakan diskriminatif. Di kalangan masyarakat Nepal pada umumnya, muncul suatu persepsi tentang orang-orang Madhes. Kelompok orang-orang Pahadi tidak mengakui orang-orang Madhes sebagai warga Nepal. Orang-orang dari kelompok Pahadi menganggap bahwa orang-orang Madhes bukan sebagai orang asli Nepal karena mereka memiliki budaya yang berbeda dan memiliki penampilan fisik yang juga berbeda. Di samping itu, orang-orang Madhes berbicara bahasa Hindi, stigma bahwa mereka bukan bagian Nepal pun muncul dari kondisi tersebut. Seringkali orang-orang Madhes dikonotasikan sebagai loyalis India, sehingga orang-orang Pahadi memperlakukan orang-orang Madhes

sebagai warga kelas dua. Sebagai dampak dari hal tersebut, banyak kemudian orang-orang dari kelompok Madhes tidak diakui haknya sebagai warga negara dan tidak memiliki identitas resmi, yang mana hal tersebut berujung kepada ketidakmampuan orang-orang Madhes untuk bekerja, menempati posisi tertentu, dan bahkan untuk memiliki properti atau lahan.

Melalui upaya-upaya diskriminatif tersebut lah kemudian gerakan-gerakan Madhesi muncul. Mengingat perlakuan yang diskriminatif terhadap mereka, orang-orang Madhes menuntut pemerintah Nepal untuk mengakui identitas mereka sebagai warga negara. Di samping itu, orang-orang Madhes menolak bentuk penyeragaman kultur dan nasionalisme. Hal tersebut dituntut sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap segala bentuk diskriminasi yang dialami.

3.2 Gerakan Madhesi

Perlakuan diskriminatif terhadap orang-orang Madhes berpengaruh dalam menjadikan wilayah Terai atau Madhes sebagai pusat gerakan pro-demokrasi pada periode 1950-an dan 1960-an. Dalam kurun waktu tersebut, dalam percakapan publik di Nepal berkembang sentimen anti India dan orang-orang Madhesi merupakan loyalis India (Sarwar, 2019). Tuduhan tersebut berkembang dan diinisiasi oleh elit politik nasionalis Nepal karena mereka menganggap imigran India dengan jumlah besar di daerah Terai dapat mendorong India untuk mengklaim daerah tersebut sebagai wilayah India (Shastri, 2016).

Anggapan tersebut yang kemudian menjaikan elit politik di Nepal mengadopsi kebijakan ketat untuk mengekang aktivisme orang-orang Madhes. Implikasi dari hal tersebut mengarah pada munculnya gerakan berbasis identitas di Madhes,

terutama dengan pembentukan dua kelompok, yaitu: *Nepal Vongress Terai* yang dipimpin oleh Vedanta Jha pada tahun 1951 dan *Madhesi Mukti Andolan* yang dipimpin oleh Raghunath Thakur pada tahun 1956 (Sarwar, 2019). Pada periode 2008 hingga saat ini banyak partai politik dan aktor-aktor non-negara terlibat dalam perjuangan orang-orang Madhes. Beberapa diantaranya ialah *Madhesi Janadhikar Forum* (MJF), dan *Terai Madhesh Loktantrik Party* (TMLP). Selain itu, di dalam gerakan Madhesi juga terdapat sejumlah kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Terai. Beberapa diantaranya ialah: *Janatantrik Terai Mukti Morcha* (JTMM), *Terai Cobra*, *Nepal Defence Army* (NDA), *Nepal Janatantrik Party* (NJP), dan *Chure Bhawar Ekta Samaj* (CBES) (Nayak, 2011). Meskipun kelompok-kelompok tersebut terlibat dalam revolusi bersenjata di Nepal, namun terdapat perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing kelompok. Kelompok JTMM misalnya, mereka menuntut pembentukan wilayah Terai yang otonom, di lain hal *Terai Cobra* bertujuan untuk membentuk perjuangan separatis bersenjata untuk negara Terai yang berdaulat, sedangkan tujuan NDA ialah membentuk pasukan Hindu dengan pembom bunuh diri untuk berperang melawan ekstremisme agama. Demikian pula halnya *Nepal Defence Army* memiliki tujuan yang berbeda, yaitu untuk mempertahankan monarki konstitusional dan demokrasi multipartai di Nepal sedangkan CBES pada dasarnya menuntut pembentukan wilayah federal *Chure Bhawar* di Terai dan menentang tuntutan negara berdaulat Madesh (Nayak, 2011).

Melalui hal tersebut dapat dilihat bahwa di internal gerakan Madhesi sendiri masih belum memiliki konsensus dalam hal tujuan gerakan, sehingga menjadikan gerakan Madhesi sebagai gerakan yang

sporadis. Partai-partai berbasis Madhes mengambil sikap yang lebih permisif terhadap tuntutan orang-orang Madhes, sedangkan kelompok-kelompok bersenjata menuntut kedaulatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri, yang mana merupakan salah satu persoalan kompleks yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Di sisi lain, partai-partai dengan latar belakang Madesh menghadapi sebuah dilema dalam menentukan arah negosiasi dan afiliasi politik terhadap partai-partai politik besar di Nepal. Perbedaan prinsip di antara kelompok-kelompok dalam gerakan Madeshi ini lah yang kemudian menciptakan fragmentasi sehingga gerakan Madeshi belum menemukan tujuan dan kepemimpinan yang jelas.

3.3 Agenda India terkait Gerakan Madhesi

Peran India di kawasan Asia Selatan memang sangat penting. Salah satu agenda yang sering diusung oleh India ialah terkait soal demokratisasi dan inklusivitas terhadap negara-negara di Asia Selatan. Peran India tersebut dapat dilihat melalui beberapa kasus. Di Sri Lanka, India telah menjadi pendukung vokal devolusi kekuasaan dan amandemen ke-13. *Operation Cactus* yang diinisiasi oleh India membantu menyelamatkan pemerintahan Presiden Gayoom dari kudeta militer di Maladewa. Demikian pula di Nepal, pemerintah India di masa lalu berpihak pada Kongres Nepal. Selama masa monarki, Kongres Nepal dipandang sebagai pelopor demokrasi dan inklusivitas.

Komitmen terhadap demokrasi dan inklusivitas yang diusung oleh India di kawasan Asia Selatan kemudian dapat ditarik kepada dimensi yang berbeda dalam melihat permasalahan gerakan Madhesi di Nepal. Mengingat kesepakatan *open borders* yang dimiliki oleh India dengan

Nepal, mengatasi persoalan Madhesi merupakan bagian dari kepentingan nasional India. Jika orang-orang Madhes tetap melakukan perlawanan terhadap konstitusi yang berlaku di Nepal, maka akan selalu ada risiko kelompok-kelompok Madhes untuk meluncurkan gerakan berbasis kekerasan. Kekerasan yang melintasi perbatasan di Terai akan menjadi hal yang sepatutnya dihindari oleh India. Oleh karenanya permasalahan Madhesi kemudian menjadi isu keamanan strategis bagi India.

Menurut Nihar Nayak, salah seorang akademisi dari India, berpendapat bahwa isu gerakan Madhesi di wilayah Terai jika terus berlanjut akan sangat merugikan bagi India (Nayak, 2011). Hal tersebut dikarenakan instabilitas yang terjadi pada wilayah Terai dapat memberikan jalan bagi Cina dan Pakistan untuk mendorong unsur-unsur anti-India di sana, melalui senjata dan perdagangan mata uang palsu, madrasah, pakaian teroris, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan gerakan Madhes menjadi hal yang perlu diatasi oleh India ketika Cina telah terlibat dalam isu gerakan Madhes itu sendiri. Diketahui bahwa Cina telah melakukan perluasan dukungan kepada faksi *Madhesi Janadhikar Forum* yang dipimpin oleh Upendra Yadav (Nayak, 2011).

Sikap yang diambil India sejauh ini dalam memperlakukan persoalan gerakan Madhesi ialah sebagai masalah internal Nepal yang dapat diselesaikan dengan mengakomodasi hak-hak minoritas dalam Konstitusi baru, artinya India secara garis besar mengambil sikap tidak campur tangan. Namun demikian, kelompok Pahadi sering menuduh India mensponsori tuntutan-tuntutan orang-orang Madhes. Menurut Nihar Nayak, jika persepsi demikian semakin meningkat dalam wacana publik Nepal, maka hal tersebut akan memperburuk sentimen anti-India

yang berkembang di Nepal sehingga mampu memberikan lebih banyak ruang bagi China dan Pakistan untuk menggunakan Nepal sebagai lokasi untuk kegiatan anti-India (Nayak, 2011).

Propaganda anti-Indiaisme yang dilancarkan oleh elit politik Nepal dalam merespon gerakan Madhesi, menurut Nihar Nayak mampu mempengaruhi kepentingan ekonomi India di Nepal. Intensitas terjadinya protes dan aksi massa akan mempengaruhi perdagangan dan hubungan komersial India dengan Nepal. Hal tersebut pun di lain hal akan memengaruhi proyek pembangkit listrik tenaga air India dan operasi bisnis para investor India di Nepal. Karena wilayah Terai merupakan penghubung antara India dan Nepal utara (Nayak, 2011). Wilayah Terai yang bermasalah dan instabil dapat memengaruhi arus distribusi barang dan jasa dari India ke Nepal.

Dalam keadaan seperti demikian, India dihadapkan pada pilihan-pilihan dilematis. Setiap upaya konstruktif oleh India untuk memperbaiki situasi di wilayah Terai melalui keterlibatan proaktif kemungkinan akan ditafsirkan sebagai intervensi yang tidak perlu dalam urusan internal Nepal dan mengganggu konstituensi Pahadi dan Angkatan Darat Nepal. Menurut Nihar Nayak, pendekatan terbaik untuk India ialah mengambil posisi sebagai fasilitator dalam rangka memperkuat kapasitas berbagai lembaga demokrasi untuk menyelesaikan ketegangan sosial di Nepal pada umumnya dan di Terai pada khususnya. Mengingat pengaruh India di Nepal, India juga dapat melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menyatukan semua partai politik untuk berdialog tentang isu-isu yang kontroversial.

Sejak Narendra Modi terpilih menjadi perdana menteri India pada tahun 2014, India telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menjalin diplomasi untuk

mewujudkan Nepal yang lebih stabil. Salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh India ialah dengan melakukan kunjungan kenegaraan, oleh Narendra Modi, pada tanggal 3 dan 4 Agustus 2014 (Pillalamarri, 2014). Dalam kesempatan itu Perdana Menteri Narendra Modi bertemu sejumlah tokoh Nepal, seperti Presiden Nepal Ram Baran Yadav dan tidak terkecuali pemimpin dari kelompok orang-orang Madhes (Narendramodi.in, 2014).

Dalam kesempatan tersebut, Perdana Menteri Narendra Modi membahas banyak isu, terutama terkait hubungan bilateral ke dua negara serta terkait konflik yang terjadi sehubungan dengan Gerakan Madhesi (Lakshmi, 2014). Politik anti-India merupakan isu yang berkembang di kalangan petinggi Nepal. Melalui kunjungannya Narendra Modi menyampaikan bahwa India dan Nepal perlu meningkatkan kualitas diplomatiknya. Dalam kesempatan yang sama, Narendra Modi juga mengatakan bahwa India sangat sensitif dalam memperlakukan Nepal sebagai negara berdaulat. Pernyataan tersebut disusul oleh penekanan bahwa India mendukung stabilitas dan kemajuan Nepal sebagai negara berdaulat, karena menurutnya hal tersebut akan menguntungkan baik Nepal maupun India (Lakshmi, 2014).

Terkait dengan isu gerakan Madhesi, dalam kesempatan berdialog dengan para pemimpin Madhesi, di mana mereka menyampaikan tentang diskriminasi yang mereka rasakan, Modi mengatakan bahwa ia mengetahui masalah Madhesi dengan sangat jelas. Namun, menurut Amresh Singh, salah seorang anggota parlemen Kongres Nepal dari Tarai, terdapat kekecewaan dari orang-orang Madhes terhadap pidato Narendra Modi yang tidak menyebutkan kata “Madhes” dalam pidato kunjungannya kenegaraannya .

Narendra Modi dalam merespon hal tersebut mengatakan kepada salah seorang pemimpin kelompok Madhes, bahwa apa yang ia sampaikan adalah tentang konstitusi yang lebih inklusif dan bahwa India melihat Nepal sebagai sebuah negara kesatuan, tanpa memandang fragmentasi yang terjadi di wilayah internal Nepal (Maheshwari, 2018). Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa Narendra Modi dan India mendukung prinsip-prinsip inklusi dan federalisme yang merupakan tuntutan dari kelompok orang-orang Madhes, namun tidak secara terbuka menyampaikan dukungannya terhadap orang-orang Madhes.

3.4 Bantuan Bencana India terhadap Nepal sebagai Diplomasi Bencana

Sebagaimana telah dijabarkan pada pendahuluan, gempa bumi besar melanda Nepal pada tanggal 25 April 2015. India merespon hal tersebut secara langsung dalam waktu empat jam setelah gempa bumi melanda Nepal. Upaya India dalam merespon gempa bumi di Nepal pada saat itu secara strategis dinamai *Operasi Maitri* (NDTV, 2015). *Operasi Maitri* dalam perjalanannya melakukan mobilisasi cepat dari satu pesawat C-130J, dua pesawat C-17 dan satu IL-76 dengan 46,5 ton bahan bantuan bersama dengan 295 anggota *National Disaster Response Force* (NDRF) (Times of India, 2015). Sebagai bagian dari operasi bantuan, India juga memobilisasi 18 unit helikopter dan Angkatan Darat India membantu pembukaan rute darat antara Kathmandu dan kota terbesar kedua di Nepal yaitu Pokhara. Selain mengirimkan bantuan, pemerintah India juga mengevakuasi 5.400 warga negara India yang terdampar di Nepal. Kemampuan taktis India dalam evakuasi pasca bencana, memunculkan respon internasional dari negara-negara di dunia

yang kemudian meminta India untuk membantu mengevakuasi warga negaranya di Nepal (Times of India, 2015).

Respon cepat dari India terhadap kondisi darurat gempa Nepal tersebut dalam artikel ini kemudian dapat ditarik pada konteks retorika politik yang lebih luas. Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa pada bulan Agustus 2014, Perdana Menteri Narendra Modi telah mengunjungi Kathmandu dua kali untuk memperbaiki hubungan serta menetralkan sentimen anti India yang berkembang di Nepal. Selain itu, upaya India yang cepat tanggap dalam merespon keadaan darurat gempa di Nepal tersebut mampu mengangkat prestise India di tingkat internasional.

Terlepas dari dukungan material dan logistik dari pemerintah India, retorika politik yang digunakan juga merupakan salah satu dukungan empati dan emosional bagi masyarakat di Nepal. Perdana Menteri Modi pada hari yang sama ketika gempa bumi berlangsung mengunggah ungkapan simpatinya melalui Twitter. Retorika empati terhadap penduduk Nepal ini tidak dilakukan tanpa alasan yang spesifik, terdapat dimensi kepentingan dan kebudayaan yang menjadi bagian dari agenda India terhadap Nepal. Menyusul gempa bumi, pemerintah India pada bulan selanjutnya memberikan pinjaman lunak kepada Nepal sebesar 1 miliar US\$. Melalui hal tersebut dapat dilihat bahwa India, di bawah Narendra Modi, berupaya untuk meningkatkan pengaruh di Nepal. Seperti yang dikemukakan Nigel Clark, situasi darurat dapat digunakan untuk mengejar kepentingan oleh kekuatan yang lebih besar. Gempa bumi di Nepal memberi India kesempatan untuk semakin memperkuat posisi strategisnya di Nepal melalui pemanfaatan diplomasi bencana dalam bentuk proyek bantuan jangka panjang.

Sehubungan dengan isu gerakan Madhesi yang sedikit banyak menjadi perhatian India di perbatasan Nepal, gempa bumi Nepal dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan negosiasi untuk mewujudkan inklusivitas dan pengentasan diskriminasi yang dialami oleh kelompok Madhes. Tentu peningkatan kualitas diplomasi hanya akan terjadi jika kedua belah pihak yang berkonflik dapat berkolaborasi dalam rangka memperbaiki kerusakan-kerusakan pasca bencana yang terjadi di Nepal.

3.5 Gerakan Madhesi pasca Gempa Nepal 2015

Pada bulan September 2015, Nepal meresmikan konstitusi baru. Konstitusi tersebut secara umum memiliki prinsip-prinsip berbasis sosialisme-demokratis. Namun, kelompok Madhesi tidak menyambut hal tersebut dengan baik. Mereka menganggap konstitusi tersebut tidak berbeda dengan konstitusi sebelumnya. Hal tersebut diyakini kelompok Madhesi tidak akan memperbaiki situasi dan masih membuka ruang diskriminasi serta marginalisasi yang dialami mereka pada konstitusi sebelumnya.

Beberapa poin yang menjadi keresahan kelompok Madhesi dalam konstitusi yang baru ialah terkait struktur Federal Nepal dan status kewarganegaraan orang-orang Madhes yang memiliki struktur keluarga campuran India dan Madhes. Terkait struktur Federal Nepal, dalam konstitusi yang baru disebutkan bahwa terdapat pemekaran provinsi di wilayah Terai. Sebelumnya hanya terdapat 6 provinsi di wilayah Terai, namun dalam konstitusi yang baru, terdapat pemekaran sehingga menjadi 7 provinsi. Hal tersebut menurut kelompok orang-orang Madhes hanya menguntungkan orang-orang Pahadi dan di

lain hal memecah belah orang-orang Madhes.

Terkait masalah kewarganegaraan, dalam konstitusi Nepal yang baru, terdapat ketentuan bahwa bahwa anak-anak yang berasal dari ayah dan ibu dengan kewarganegaraan berbeda tidak akan mendapatkan status kewarganegaraan. Hal tersebut menciptakan ketakutan di antara orang-orang Madhesi yang mana sebagian besar dari mereka memiliki hubungan perkawinan dengan orang berkewarganegaraan India. Beberapa permasalahan ini yang kemudian mendorong orang-orang Madhes melakukan perlawanan dengan berbagai macam bentuk.

Menurut laporan Human Rights Watch, terdapat beberapa insiden yang terjadi menyusul gerakan yang dilakukan oleh orang-orang Madhes. Beberapa diantara ialah insiden Bara, insiden Parsa, dan insiden Dhanusa. Pada 1 September terjadi demonstrasi masa oleh orang-orang Madhes di daerah Bara, Kalaiya, yang diikuti oleh sekitar 150 orang-orang Madhes. Pemerintah Nepal merespon protes ini dengan represif, sehingga menewaskan salah seorang demonstran, bernama Hifajat Miya.

Pada bulan Agustus 2015, kelompok orang-orang Madhes melakukan aksi masa di Distrik Parsa. Distrik Parsa merupakan titik transit utama barang-barang dari India ke Nepal. Titik tersebut diblokir oleh para pengunjuk rasa. Pemerintah Nepal merespon hal tersebut dengan memberlakukan jam malam. Dengan diberlakukan jam malam tersebut, para demonstran memulai aksi vandal terhadap gedung-gedung pemerintahan dan juga terlibat bentrok dengan pihak kepolisian Nepal. Kepolisian Nepal bertindak represif dalam merespon hal tersebut sehingga terdapat beberapa korban jiwa.

Seluruh peristiwa tersebut memuncak ketika gerakan Madhes meningkat menjadi upaya separasi di mana mereka menuntut hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*). Gerakan tersebut bernama *Independent Madhes Movement*. Mereka mendeklarasikan bahwa Nepal merupakan penjajah terhadap teritorial Madhes di daerah Tarai. Gerakan ini dipimpin oleh C K Raut. C K Raut merupakan orang Madhes dari golongan intelektual dan cukup berpengaruh. Berdasarkan hal tersebut, gerakan *Independent Madhes Movement* memiliki penerimaan yang sangat luas di kalangan orang-orang Madhes.

Mengacu kepada konsep diplomasi bencana, gempa bumi pada bulan April 2015 seharusnya mampu menjadi katalisator untuk membuka ruang baru bagi diplomasi terhadap rekonsiliasi terkait konflik yang terjadi antara orang-orang Madhes dan pemerintah Nepal. Namun berdasarkan apa yang telah dibahas dalam paragraf di atas, dapat dilihat bahwa rekonsiliasi gagal terjadi. India yang berusaha memanfaatkan peristiwa gempa bumi sebagai momentum yang dapat menunjang proses rekonsiliasi pun ternyata mendapatkan hasil yang bertolak belakang dari apa yang India harapkan. Tindakan diplomasi bencana yang dilakukan oleh India tidak meredam eskalasi konflik yang terjadi dimana Pemerintah Nepal justru meresmikan konstitusi baru yang tidak mengakomodir kepentingan orang-orang Madhes. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa stabilitas Nepal merupakan bagian dari kepentingan India, sehingga konflik antara orang-orang Madhes dan pemerintah Nepal akan mempengaruhi agenda India di berbagai sektor.

4. Kesimpulan dan Saran

Nepal merupakan sektor penting yang menjadi perhatian India dalam sektor-sektor strategis India. Instabilitas yang terjadi di Nepal akibat segregasi dan benturan kepentingan antara kelompok Madhesi dan Pahadi membuat India perlu untuk memastikan stabilitas di Nepal agar kemudian dapat menjalankan agenda-agenda strategis lainnya di kawasan Asia Selatan. Fenomena gempa bumi pada tahun 2015 membuka peluang bagi India untuk meningkatkan kualitas diplomasinya dalam rangka meningkatkan stabilitas di Nepal dan memfasilitasi rekonsiliasi antara kelompok Madhesi dan Pahadi. Hal tersebut mengacu kepada premis yang ditawarkan Ian kelman bahwa bencana dapat menjadi katalisator bagi diplomasi antar pihak yang berkonflik.

Diplomasi bencana sendiri tidak selalu berjalan seperti yang diinginkan. Dalam kasus gerakan Madhesi, diplomasi bencana yang dilakukan oleh India ternyata tidak membuka peluang baru bagi orang-orang Madhes dan Pahadi untuk mencapai rekonsiliasi. Adapun fakta yang terjadi ialah gerakan Madhesi mengalami peningkatan eskalasi, yang mana dapat dilihat pada fakta bahwa pasca gempa terjadi, pada bulan Agustus, kelompok orang-orang Madhes melakukan demonstrasi besar-besaran dan memblokir wilayah Terai. Mengacu kepada konsep diplomasi bencana, upaya India dalam menjadikan bencana gempa bumi Nepal sebagai katalisator untuk meningkatkan kualitas diplomasi antar pihak yang berkonflik menciptakan sesuatu yang berlawanan dari yang diharapkan. Fenomena tersebut sering terjadi dalam diplomasi bencana. Adapun penulis merekomendasikan bahwa kedepan perlu diteliti lebih lanjut mengenai faktor apa saja yang kemudian membuat

diplomasi bencana India terhadap Nepal menemui kegagalan.

Daftar Pustaka

- Alesina, A., & Dollar, D. (2000). Who gives foreign aid to whom and why? *Journal of Economic Growth*, 5(1), 33–63.
<https://doi.org/10.1023/A:1009874203400>
- BBC News. (2015a, April 15). *Nepal earthquakes: Devastation in maps and images*. pp. 1–12. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-asia-32479909>
- BBC News. (2015b, April 27). *Nepal quake: What is the world doing to help?* pp. 1–7. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-asia-32477180>
- Bharti, S. (2019). Origin and Growth of Madhesi Movement in Nepal. In P. Jaiswal (Ed.), *Emerging Conflicts and Regional Security in South Asia* (1st ed., pp. 268–296). Retrieved from https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/60073320/subodh20190721-105180-12xz1ye.pdf?response-content-disposition=attachment%3Bfilename%3DOrigin_and_Growth_of_Madhesi_Movement_in.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y5
- Cohen, C., & Werker, E. D. (2008). The political economy of “natural” disasters. *Journal of Conflict Resolution*, 52(6), 795–819.
<https://doi.org/10.1177/0022002708322157>
- Dudley, L., & Montmarquette, C. (1976). A Model of the Supply of Bilateral Foreign Aid. *The American Economic Review*, 66(1), 132–142.
<https://doi.org/10.2307/1804951>

- Economic Times. (2015, June 26). *India announces \$ 1 billion aid for rebuilding Nepal*. pp. 1–12. Retrieved from <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/india-announces-1-billion-aid-for-rebuilding-nepal/articleshow/47810366.cms>
- Kelman, I. (2013). *Disaster Diplomacy: How disaster affect peace and conflict* (1st ed.). https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4399-4_89
- Lakshmi, R. (2014). Modi ' s speech in Nepal shows India is paying attention to its neighbors. *The Washington Post*, pp. 1–6. Retrieved from <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/08/05/modis-speech-in-nepal-shows-india-is-paying-attention-to-its-neighbors/>
- Maheshwari, D. (2018, May 14). Nepal visit : PM Modi criticised for failing the Madhesi people. *National Herald*, pp. 1–5. Retrieved from <https://www.nationalheraldindia.com/international/nepal-visit-pm-modi-criticised-for-failing-the-madhesi-people>
- Narendramodi.in. (2014). Prime Minister Shri Narendra Modi enthralled Nepal by his visit. Retrieved from <https://www.narendramodi.in/ka/prime-minister-shri-narendra-modi-enthralled-nepal-by-his-visit-6427>
- Nayak, N. (2011). The Madhesi movement in Nepal: Implications for India. *Strategic Analysis*, 35(4), 640–660. <https://doi.org/10.1080/09700161.2011.576099>
- NDTV. (2015, June 4). India ' s ' Operation Maitri ' in Earthquake-Hit Nepal Ends. *NDTV*, pp. 1–2. Retrieved from <https://www.ndtv.com/india-news/indias-operation-maitri-in-earthquake-hit-nepal-ends-768795%0A0mar>
- Pillalamarri, A. (2014, August 1). Narendra Modi to Visit Nepal. *The Diplomat*, pp. 1–5. Retrieved from <https://thediplomat.com/2014/08/narendra-modi-to-visit-nepal/>
- Sarwar, L. (2019). *India Nepal relations vis a vis Madhesi issue*. 8(3), 50–53.
- Shastri, S. (2016). The madhesi conundrum: making sense of india's stand. *International Strategic and Security Studies Programme*, 41, 1–7. Retrieved from <http://issp.in/the-madhesi-conundrum-making-sense-of-indias-stand/>
- Subedi, S., & Bahadur Poudyal Chhetri, M. (2019). Impacts of the 2015 Gorkha Earthquake: Lessons Learnt from Nepal. In *Earthquakes - Impact, Community Vulnerability and Resilience* (pp. 1–21). <https://doi.org/10.5772/intechopen.85322>
- Times of India. (2015, April 28). Nepal earthquake : Operation Maitri reaches relief to epicentre. *Times of India*, pp. 2–5. Retrieved from <https://timesofindia.indiatimes.com/india/Nepal-earthquake-Operation-Maitri-reaches-relief-to-epicentre/articleshow/47075972.cms>